



71
Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024-2026**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BAPPERIDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Pamekasan, April 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pamekasan



SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730802 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 12	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	55
BAB III	56
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	58
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	59
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	63
3.5 Isu strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	68
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	68
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	25
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	41
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan ..	56
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	58
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan	59
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	59
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	63
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW	64
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS	65
Tabel 3.8	Identifikasi Isu Strategis Daerah	66
Tabel 3.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	66
Tabel 3.10	Nilai Skala Kriteria	67
Tabel 3.11	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	67
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	68
Tabel 4.2	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).....	69
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	72
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	94
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	94
Tabel 7.3	Target Pencapaian SPM	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	20
Gambar 4.1 Pohon Kinerja	69
Gambar 4.2 Cascading Kinerja.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Akan tetapi Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2023, penyusunan Renstra menggunakan Inmendagri No. 52 Tahun 2022. Karena Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan masa jabatan akan berakhir pada tahun 2023 maka dari itu penyusunan Renstra Kabupaten Pamekasan selain berpedoman pada Permendagri No 86 Tahun 2017 juga berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Pemerintah Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan 1.) Urusan Komunikasi dan Informatika 2.) Urusan Statistik 3.) Urusan Persandian

Dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Pamekasan.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;



28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Pamekasan;
29. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.



7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis komunikasi dan informatika;
- e. Pembinaan dan pemeliharaan pengelolaan pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:



- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Statistik, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum komunikasi dan informatika;



- c. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis komunikasi dan informatika;
- e. Pembinaan dan pemeliharaan pengelolaan pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan/aset;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan korrordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tatalaksana, serta program kegiatan Badan;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Badan;



- g. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi dan pemerintahan dan reformasi birokrasi antar Bidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayan publik antar Bidang;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, keinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi antar Badan;
- l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proqram kegiatan sekretariat;
- m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi sekretariat;
- n. Pengelolaan kinerja aparatur;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Aplikasi Informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan program aplikasi informatika;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;
- c. Pengendalian data dan informasi elektronik bidang Aplikasi Informatika;
- d. Pengoordinasian kebijakan aplikasi informatika;
- e. Pengendalian fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang Aplikasi Informatika;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan aplikasi informatika;
- g. Penilaian kinerja bawahan;
- h. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Aplikasi Informatika;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi media komunikasi public;
- c. Pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah;



- d. Pelaksanaan kemitraan, pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi dan hubungan komunikasi publik;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan informasi dan media komunikasi publik;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persandian dan keamanan informasi;
- c. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- d. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- e. Pembinaan dan pengelolaan persandian keamanan informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi system keamanan informasi;
- g. Penilaian kinerja bawahan;



- h. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang persandian dan keamanan informasi;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di Bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistic sectoral dilingkup daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistic;
- c. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang statistik;
- d. Pembinaan dan pengelolaan data statistic;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Statistik;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Statistik;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;



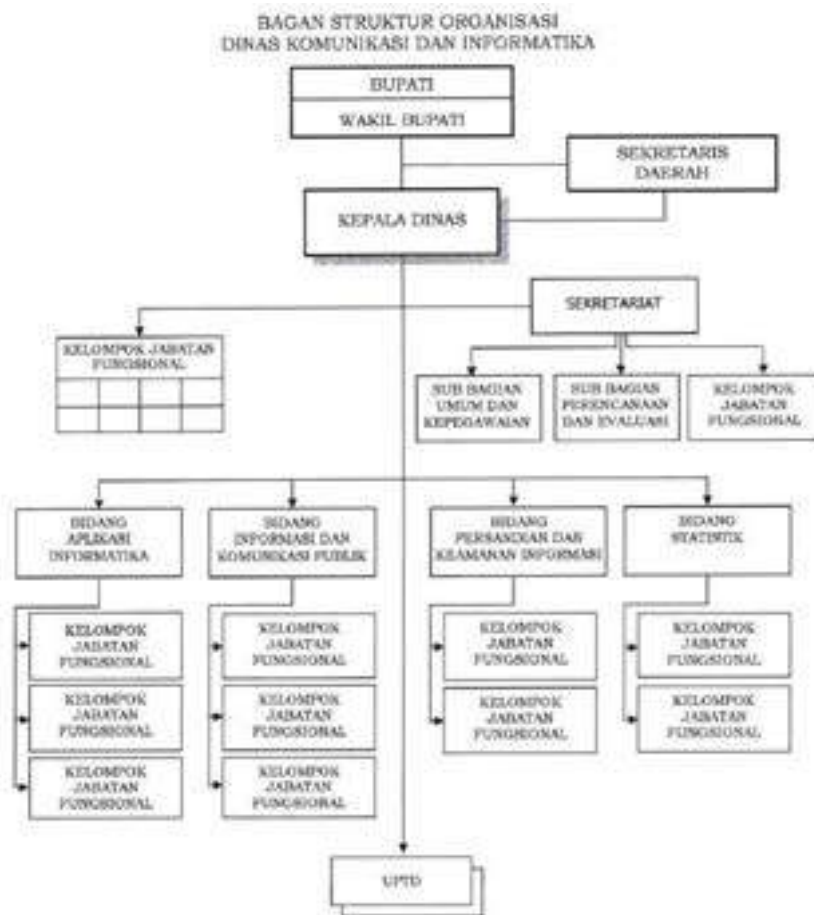
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris dinas;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan dinas;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan dinas;
- j. Menilai kinerja bawahan;
- k. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Sub bagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan dinas;
- b. Menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan dinas;
- c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan dinas;

- d. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan dinas;
- e. Menilai kinerja bawahan;
- f. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Eslon II | : 1 |
| 2. Eslon III | : 5 |
| 3. Eslon IV | : 1 |
| 4. Pejabat fungsional | : 11 |
| 5. Staf/Non Eslon | : 10 |



Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 28 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------|
| 1. Sarjana S-2 | : 8 |
| 2. Sarjana S-1 | : 16 |
| 3. Diploma -3 | : 1 |
| 4. SLTA | : 3 |
| 5. SLTP | : 0 |
| 6. SD | : 0 |



2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

NO. URUT	GOLO NGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	TANAH	2	1.712.400.000,0 0	
			TOTAL		1.712.400.000,0 0	
2	2		PERALATAN DAN MESIN			
		2	a.Alat-alat Besar	0	N/A	
		3	b.Alat-alat Angkutan	0	N/A	
		4	c.Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0	N/A	
		5	d.Alat-alat Pertanian/peternakan	0	N/A	
		6	e.Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	634	7.745.699.800,0 0	
		7	f.Alat-alat Studio dan Komunikasi	0	N/A	
		8	g.Alat-alat Kedokteran	0	N/A	
		9	h.Alat-alat Laboratorium	0	N/A	
		10	i.Alat-alat keamanan	0	N/A	
			TOTAL		7.745.699.800,0 0	
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN			
		11	a.Bangunan Gedung	10	5.597.216.075,0 0	
		12	b.Bangunan Monumen	0		
			TOTAL		5.597.216.075,0 0	
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		13	a.Jalan dan Jembatan	N/A	N/A	
		14	b.Bangunan Air/Irigasi	N/A	N/A	
		15	c.Instalasi	N/A	N/A	
		16	d.Jaringan	11	3.799.220.000,0 0	
			TOTAL		3.799.220.000,0 0	
5	5		ASET TETAP LAINNYA			
		17	a.Buku Perpustakaan	1	49.400.000,00	
		18	b.Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	N/A	N/A	



NO. URUT	GOLO NGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		19	c..Hewan Ternak dan Tumbuhan	N/A	N/A	
			TOTAL		49.400.000,00	
	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	N/A	N/A	
	7		ASET TAK BERWUJUD DAN LAIN - LAIN	13	763.380.000,00	
			TOTAL		763.380.000,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema tik Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
sebelum perubahan																			
	Indeks Transparansi	N/A	N/A	N/A	N/A	61,5	63	64,5	65	N/A	2,2	3,01	N/A	N/A	N/A	3,58%	4,78%	N/A	N/A
	Nilai SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	2,6	3,2	3,4	3,6	N/A	75,4	73	N/A	N/A	N/A	2900,00%	2281,25%	N/A	N/A
setelah perubahan																			
	Indeks SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,4	2,9	N/A	N/A	N/A	2,12	2,10	N/A	N/A	N/A	88%	72%
	Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	2,1	1,80	N/A	N/A	N/A	105%	60%
	Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	1,5	1,60	N/A	N/A	N/A	75%	53%
	Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	1	1,00	N/A	N/A	N/A	50%	33%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	2,87	2,87	N/A	N/A	N/A	144%	96%
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	90%	95%	100%	N/A	N/A	92,85 71%	100%	100%	N/A	N/A	103%	105%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	90%	95%	100%	N/A	N/A	47%	57,89 47%	60%	N/A	N/A	53%	61%	60%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	93,43 15%	63,40 98%	N/A	N/A	100%	93%	63%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema, Indikator Lainnya, misalnya, misalnya, dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota																		
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	73%	100%	100%	N/A	N/A	73%	100%	100%
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	73%	100%	100%	N/A	N/A	73%	100%	100%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	pembangunan daerah																		
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		0,14	N/A	N/A	N/A	0	0,1	0,14	N/A	N/A	N/A	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%	0%
7	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	88%	95%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	0%	105%	100%
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	88%	95%	100%	N/A	N/A	91%	100%	100%	N/A	N/A	103%	105%	100%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema tik Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo																		
9	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	N/A	Ada	N/A	N/A	N/A	Ada	Ada	Ada	N/A	N/A	ada	ada	tidak	N/A	N/A	Ada	Ada	0%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema Tik Lainnya, misalnya, misalnya, dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
10	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	86%	95%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	117%	105%	100%
11	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		100%	N/A	N/A	N/A	86%	95%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	117%	105%	100%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema tik Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
12	Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	11%	100%	100%	N/A	N/A	11%	100%	100%
13	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	31,58 %	63,16 %	100%	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%	0%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema tik Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	telah diimplementasikan secara elektronik																		
14	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	31,58%	63,16%	100%	N/A	N/A	5%	5,26%	10%	N/A	N/A	17%	8%	10%
15	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	5%	100%	100%	N/A	N/A	5%	100%	100%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
16	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		100%	N/A	N/A	N/A	31,58%	63,16%	100%	N/A	N/A	100%	10,53%	0%	N/A	N/A	317%	17%	0%
17	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	56%	100%	100%	N/A	N/A	56%	100%	100%
18	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		50%	N/A	N/A	N/A	19,04%	35,71%	50%	N/A	N/A	56%	7,14%	100%	N/A	N/A	292%	20%	200%
19	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui		50%	N/A	N/A	N/A	19,04%	35,71%	50%	N/A	N/A	56%	7,14%	33,6%	N/A	N/A	292%	20%	67%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema, Indikator Lainnya, misalnya, misalnya, dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)																		
20	Persentase data yang dapat berbagi pakai	N/A	50%	N/A	N/A	N/A	19,04 %	35,71 %	50%	N/A	N/A	56%	2,38%	2,3810%	N/A	N/A	292%	7%	5%
21	Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasi inovasi yang mendukung smart city	N/A	50%	N/A	N/A	N/A	19,04 %	35,71 %	50%	N/A	N/A	2%	2,38%	26,1905%	N/A	N/A	10%	7%	52%
22	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	0%	59,52 %	100%	N/A	N/A	50%	0%	0%	N/A	N/A	#DIV/0!	0%	0%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema, Indikator Lainnya, misalnya, misalnya dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
23	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	N/A	Ada	N/A	N/A	N/A	Ada	Ada	Ada	N/A	N/A	Tidak ada	Ada	Ada	N/A	N/A	Tidak ada	Ada	Ada
24	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	N/A	0,60 %	N/A	N/A	N/A	0,50%	0,55%	0,60%	N/A	N/A	N/A	100%	93,33 33%	N/A	N/A	0%	18182 %	15556%
25	Persentase konten informasi terkait program dan	N/A	0,05 %	N/A	N/A	N/A	0,05%	0,10%	0,15%	N/A	N/A	N/A	66,42 %	71,01 45%	N/A	N/A	0%	66420 %	47343%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema, Indikator Lainnya, misalnya, misalnya, dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)																		
26	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	N/A	0,05 %	N/A	N/A	N/A	0,05%	0,10%	0,15%	N/A	N/A	N/A	90%	100%	N/A	N/A	0%	90000 %	66667%
27	Tersedianya buku profil daerah	N/A	Tidak Ada	N/A	N/A	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	N/A	N/A	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	N/A	N/A		Tidak Ada	Tidak Ada
28	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	26	48	N/A	N/A	0%	2600%	4800%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema Lainnya, misalnya, misalnya, dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
29	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Tidak Ada	N/A	N/A	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	N/A	N/A	N/A	106	959	N/A	N/A	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
30	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	4	N/A	N/A	0%	100%	400%
31	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Tidak Ada	N/A	N/A	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	N/A	N/A	N/A	0	4	N/A	N/A	Tidak ada	0%	4%
32	Persentase kelengkapan metadana kegiatan statistik sektoral		100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0%	4,5455%	N/A	N/A	0%	0%	5%
33	Persentase kelengkapan metadana variabel sektoral		100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0%	0,8147%	N/A	N/A	0%	0%	1%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema Lainnya, misalnya, misalnya, dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
34	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	2%	N/A	N/A	N/A	0%	33,33 33%	N/A	N/A	N/A	0%	1667%
35	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	2%	N/A	N/A	N/A	0%	1,818 2%	N/A	N/A	N/A	0%	91%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema, Indikator Lainnya, misalnya, misalnya, dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	persediaan dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah																		
36	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	2%	N/A	N/A	N/A	0%	0%	N/A	N/A	N/A	0%	0%
37	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	2%	N/A	N/A	N/A	0%	1,9231%	N/A	N/A	N/A	0%	96%



No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tema tik Lainnya, misal stunting dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan																		



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 391.040.000	Rp 391.040.000	Rp 356.145.950	N/A	N/A	Rp 331.159.911	Rp 347.422.446	Rp 334.272.781	N/A	N/A	85%	89%	94%	N/A	N/A	16062595000%	968770250%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 100.640.000	Rp 100.640.000	Rp 62.000.000	N/A	N/A	Rp 99.344.338	Rp 100.639.798	Rp 61.999.000	N/A	N/A	99%	100%	100%	N/A	N/A	1168000000%	-1802493900%
Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Rp 290.400.000	Rp 290.400.000	Rp 294.145.950	N/A	N/A	Rp 231.815.573	Rp 246.782.648	Rp 272.273.781	N/A	N/A	80%	85%	93%	N/A	N/A	14894595000%	2771264150%
PROGRAM PENINGKATAN SARAN ADAN PRASARANAN APARATUR	Rp 1.862.098.000	Rp 497.321.050	Rp 277.990.000	N/A	N/A	Rp 1.513.403.766	Rp 308.884.392	Rp 261.574.822	N/A	N/A	81%	62%	94%	N/A	N/A	133544747500%	122817415900%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 1.052.098.000	Rp 297.321.050	Rp -	N/A	N/A	Rp 722.611.600	Rp 118.782.400	Rp -	N/A	N/A	69%	40%	#DIV/0!	N/A	N/A	-90343747500%	-66322040000%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 49.250.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A	N/A	5000000000%	4925000000%
Pengadaan meubelair	Rp 75.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 74.500.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A	N/A	-7500000000%	-7450000000%
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 85.000.000	Rp 75.000.000	Rp 49.500.000	N/A	N/A	Rp 77.351.366	Rp 65.947.992	Rp 42.367.222	N/A	N/A	91%	88%	86%	N/A	N/A	2000000000%	-2319375900%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 15.990.000	N/A	N/A	Rp 49.388.800	Rp 49.554.000	Rp 15.967.600	N/A	N/A	99%	99%	100%	N/A	N/A	-	-
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 150.000.000	Rp 75.000.000	Rp 37.500.000	N/A	N/A	Rp 150.000.000	Rp 74.600.000	Rp 37.396.000	N/A	N/A	100%	99%	100%	N/A	N/A	-	-
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DID)	Rp 400.000.000	Rp -	Rp 75.000.000	N/A	N/A	Rp 390.302.000	Rp -	Rp 66.970.000	N/A	N/A	98%	0%	89%	N/A	N/A	-	-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp 98.874.000	N/A	N/A	0%	0%	99%	N/A	N/A	1000000000%	494370000%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 80.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 79.157.500	Rp -	Rp -	N/A	N/A	99%	0%	0%	N/A	N/A	800000000%	791575000%
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 29.400.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	98%	0%	0%	N/A	N/A	-	-
pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 49.757.500	Rp -	Rp -	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp 75.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	N/A	N/A	Rp 72.086.580	Rp 49.468.000	Rp 49.242.040	N/A	N/A	96%	99%	98%	N/A	N/A	0%	-



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
pendidikan dan pelatihan formal	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	N/A	N/A	Rp 47.086.680	Rp 49.468.000	Rp 49.242.040	N/A	N/A	94%	99%	98%	N/A	N/A	250000000%	226834000%
penyusunan kelas jabatan pegawai (PAK)	Rp 25.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 24.999.900	Rp -	Rp -	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	250000000%	249999000%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000	Rp 55.000.000	N/A	N/A	Rp 66.500.000	Rp 24.992.300	Rp 54.615.000	N/A	N/A	89%	100%	99%	N/A	N/A	75000000%	266963500%
Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Rp 50.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	N/A	N/A	Rp 45.000.000	Rp 24.992.300	Rp 24.990.000	N/A	N/A	90%	100%	100%	N/A	N/A	125000000%	200088500%
koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 30.000.000	N/A	N/A	Rp 21.500.000	Rp -	Rp 29.625.000	N/A	N/A	86%	0%	99%	N/A	N/A	50000000%	66875000%
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.635.770.000	Rp 1.353.105.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 1.265.534.000	Rp 1.321.545.000	Rp -	N/A	N/A	48%	98%	0%	N/A	N/A	195921750000%	60476150000%
pembangunan smart city pamekasan (DPA-L)	Rp 2.570.770.000	Rp 1.288.105.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 1.265.534.000	Rp 1.257.485.000	Rp -	N/A	N/A	49%	98%	0%	N/A	N/A	192671750000%	63679150000%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
pengadaan STL (pemancar sistem tembak) radio RALITA FM (jadwal ulang)	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp 64.060.000	Rp -	N/A	N/A	0%	99%	0%	N/A	N/A	-	3203000000%
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Rp 1.010.900.000	Rp 138.800.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 913.925.000	Rp 108.582.142	Rp -	N/A	N/A	90%	78%	0%	N/A	N/A	-	85963392900%
Pengadaan tower radio RALITA FM (DPA-L)	Rp 935.900.000	Rp 25.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 882.725.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	94%	0%	0%	N/A	N/A	-	88272500000%
fasilitasi perijinan/izin siar radio RALITA FM (DPA-L)	Rp 75.000.000	Rp 43.800.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 31.200.000	Rp 38.872.142	Rp -	N/A	N/A	42%	89%	0%	N/A	N/A	-	1176392900%
Pengadaan sarana dan prasarana Radio RALITA FM (PAK)	Rp -	Rp 70.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp 69.710.000	Rp -	N/A	N/A	#DIV/0!	100%	0%	N/A	N/A	3500000000%	3485500000%
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Rp 260.000.000	Rp 314.678.950	Rp 283.299.500	N/A	N/A	Rp 234.680.399	Rp 264.098.422	Rp 172.640.057	N/A	N/A	90%	84%	61%	N/A	N/A	18063897500%	-1631115950%
pembinaan dan pengembangan jaringan	Rp 50.000.000	Rp 84.678.950	Rp 36.949.500	N/A	N/A	Rp 48.483.500	Rp 75.172.000	Rp 34.849.500	N/A	N/A	97%	89%	94%	N/A	N/A	2928897500%	6527250000%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
komunikasi dan informasi																	
pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	-	-
pengelolaan RADIO RALITA FM	Rp 180.000.000	Rp 230.000.000	Rp 226.350.000	N/A	N/A	Rp 156.196.899	Rp 188.926.422	Rp 117.790.557	N/A	N/A	87%	82%	52%	N/A	N/A	161350000%	-
Pendukung millennial talent hub	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000	N/A	N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	N/A	N/A	200000000%	100000000%
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 29.450.000	Rp 39.642.000	Rp -	N/A	N/A	98%	99%	0%	N/A	N/A	100000000%	-
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informatika	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 29.450.000	Rp 39.642.000	Rp -	N/A	N/A	98%	99%	0%	N/A	N/A	100000000%	-
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 191.069.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	96%	0%	0%	N/A	N/A	200000000%	-



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 191.069.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	96%	0%	0%	N/A	N/A	-	-
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MAS MEDIA	Rp 8.635.752.000	Rp 7.230.100.000	Rp 531.230.700	N/A	N/A	Rp 2.052.145.135	Rp 6.498.450.900	Rp 525.175.599	N/A	N/A	24%	90%	99%	N/A	N/A	448947130000%	145966811450%
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Rp 75.000.000	Rp 70.000.000	Rp 22.729.900	N/A	N/A	Rp 73.112.500	Rp 69.717.500	Rp 21.509.000	N/A	N/A	97%	100%	95%	N/A	N/A	-	-
penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp 65.000.000	Rp 75.000.000	Rp 50.000.000	N/A	N/A	Rp 64.740.000	Rp 74.783.900	Rp 49.830.000	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	2250000000%	243305000%
penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Rp 15.000.000			N/A	N/A	Rp 15.000.000			N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	-	-
penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	Rp 350.000.000	Rp 250.000.000	Rp 158.500.800	N/A	N/A	Rp 267.826.000	Rp 249.109.500	Rp 157.387.600	N/A	N/A	77%	100%	99%	N/A	N/A	-	-
pengelolaan informasi dan dokumentasi	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
peringatan hari kebangkitan nasional	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 39.375.000	Rp 40.000.000	Rp -	N/A	N/A	98%	100%	#DIV/0!	N/A	N/A	-	-
penyelenggaraan pejabat pengelolaan informasi dan	Rp 300.000.000	Rp 311.600.000	Rp 300.000.000	N/A	N/A	Rp 296.820.000	Rp 311.158.000	Rp 296.448.999	N/A	N/A	99%	100%	99%	N/A	N/A	1558000000%	698349950%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
dokumentasi (PPID) daerah																	
Pembentukan sosialisasi PPID Desa/kelurahan (PAK)	Rp -	Rp 80.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp 79.117.000	Rp -	N/A	N/A	0%	99%	0%	N/A	N/A	4000000000%	3955850000%
pengembangan pemanfaatan sandi dan telekomunikasi	Rp 285.752.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 279.140.735	Rp -	Rp -	N/A	N/A	98%	0%	0%	N/A	N/A	-28575200000%	-279140735000%
pengelolaan telecenter daerah	Rp 90.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 80.958.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	90%	0%	0%	N/A	N/A	9000000000%	8095800000%
pengelolaan smart city	Rp 7.415.000.000	Rp 6.403.500.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 935.172.900	Rp 5.674.565.000	Rp -	N/A	N/A	13%	89%	0%	N/A	N/A	42132500000%	190210960000%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA ELEKTRONIK	Rp 238.000.000	Rp 6.225.800.000	Rp 5.657.913.000	N/A	N/A	Rp 232.711.000	Rp 2.236.316.603	Rp 5.598.147.400	N/A	N/A	98%	36%	99%	N/A	N/A	853281300000%	368452100150%
Pemanfaatan M-cap sebagai akses internet bagi masyarakat pedesaan	Rp -	Rp 25.000.000	Rp 490.000	N/A	N/A	Rp -	Rp 24.406.000	Rp 490.000	N/A	N/A	0%	98%	100%	N/A	N/A	12990000000%	12448000000%
pengelolaan website pemerintah daerah	Rp 238.000.000	Rp 200.000.000	Rp 180.250.000	N/A	N/A	Rp 232.711.000	Rp 103.464.100	Rp 170.300.000	N/A	N/A	98%	52%	94%	N/A	N/A	42250000000%	-95828950000%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
pengelolaan/pengembangan smart city	Rp -	Rp 6.000.800.000	Rp 5.467.215.000	N/A	N/A	Rp -	Rp 2.108.446.503	Rp 5.417.557.400	N/A	N/A	0%	35%	99%	N/A	N/A	846761500000%	376300195150%
Penilaian penerapan e-Gov OPD se Kabupaten Pamekasan	Rp -	Rp -	Rp 9.958.000	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp 9.800.000	N/A	N/A	0%	0%	98%	N/A	N/A	995800000%	490000000%
Pelatihan SDM dalam bidang IT	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Rp 215.524.000	Rp 250.947.000	Rp 381.509.000	N/A	N/A	Rp 190.470.000			N/A	N/A	88%	0%	0%	N/A	N/A	29145850000%	-1904700000%
Penyusunan nilai tukar petani daerah	Rp 30.000.000	Rp 30.516.000	Rp 60.403.000	N/A	N/A	Rp 29.975.000	Rp 29.422.450	Rp 49.751.200	N/A	N/A	100%	96%	82%	N/A	N/A	4566100000%	961182500%
Penyusunan nilai tukar nelayan daerah	Rp 30.000.000	Rp 30.431.000	Rp 60.366.000	N/A	N/A	Rp 29.975.000	Rp 29.235.000	Rp 55.377.356	N/A	N/A	100%	96%	92%	N/A	N/A	4558150000%	1233117800%
penyusunan indek harga konsumen daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	2500000000%	500000000%
penyusunan rasio genie	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000	N/A	N/A	Rp 29.998.000	Rp 28.103.900	Rp 33.200.000	N/A	N/A	100%	94%	95%	N/A	N/A	2000000000%	65395000%
penyusunan profil koperasi	Rp 30.178.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 30.176.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	3017800000%	3017600000%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
primer dan sekunder																	
pendataan tower BTS Kabupaten Pamekasan	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
Pendataan warnet di Kabupaten Pamekasan	Rp 20.346.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 20.346.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	2034600000%	2034600000%
Pengelolaan E Statistik sektoral (PAK)	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 50.000.000	N/A	N/A	Rp -	Rp 68.000	Rp 46.505.000	N/A	N/A	0%	0%	93%	N/A	N/A	3500000000%	2328650000%
Penyusunan profil daerah	Rp -	Rp 50.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	2500000000%	0%
Penyusunan profil kecamatan	Rp -	Rp 40.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	2000000000%	0%
Pengelolaan data/informasi bidang Komunikasi dan Informatika	Rp -	Rp -	Rp 40.740.000	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp 40.690.500	N/A	N/A	0%	0%	100%	N/A	N/A	4074000000%	2034525000%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan data statistik	Rp -	Rp -	Rp 17.491.600	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp 13.046.600	N/A	N/A	0%	0%	75%	N/A	N/A	1749160000%	652330000%
Pengembangan infrastruktur statistik	Rp -	Rp -	Rp 117.508.400	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp 115.910.000	N/A	N/A	0%	0%	99%	N/A	N/A	11750840000%	579550000%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN	Rp 89.850.000	Rp 90.000.000	Rp 75.000.000	N/A	N/A	Rp 89.212.500	Rp 70.153.600	Rp 68.526.000	N/A	N/A	99%	78%	91%	N/A	N/A	3015000000%	1987270000%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
INFRASTRUKTUR TIK																	
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (pembuatan kalender 2018)	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
pengawasan dan pengendalian infrastruktur teknologi dan komunikasi	Rp 59.850.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	N/A	N/A	Rp 59.336.500	Rp 44.336.500	Rp 44.980.800	N/A	N/A	99%	89%	90%	N/A	N/A	1515000000%	-1467785000%
pengadaan sarana kelengkapan tower BTS (PAK)	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp 29.876.000	Rp -	Rp -	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	-3000000000%	-2987600000%
peringatan hari kebangkitan nasional	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
Fasilitasi pembinaan pemanfaatan menara komunikasi	Rp -	Rp 40.000.000	Rp 25.000.000	N/A	N/A	Rp -	Rp 25.817.100	Rp 23.545.200	N/A	N/A	0%	65%	94%	N/A	N/A	4500000000%	2468115000%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEAMANAN INFORMASI	Rp -	Rp 250.000.000	Rp 103.560.250	N/A	N/A	Rp -	Rp 147.452.536	Rp 101.176.780	N/A	N/A	0%	59%	98%	N/A	N/A	22856025000%	12431465800%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi pengembangan layanan keamanan informasi	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp -	Rp -	N/A	N/A	0%	0%	0%	N/A	N/A	0%	0%
Fasilitasi pengembangan keamanan informasi (PAK)	Rp -	Rp 50.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp -	Rp 45.398.800	Rp -	N/A	N/A	0%	91%	0%	N/A	N/A	2500000000%	2269940000%
Pengembangan pemanfaatan sandi dan telekomunikasi	Rp -	Rp 200.000.000	Rp 103.560.250	N/A	N/A	Rp -	Rp 102.053.736	Rp 101.176.780	N/A	N/A	0%	51%	98%	N/A	N/A	20356025000%	10161525800%
Setelah perubahan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	N/A	N/A	N/A	Rp 9.549.436.221	Rp 3.937.049.775				Rp 8.745.210.823	Rp 3.725.375.275				92%	95%	393704977400%	372537527400%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp 106.591.300	Rp 110.628.400				Rp 106.370.600	Rp 96.752.400				100%	87%	11062839900%	9675239900%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp 1.792.192.620	Rp 2.302.679.074				Rp 1.574.745.665	Rp 2.146.214.459				88%	93%	230267907300%	214621445800%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp 6.268.886.250	Rp 50.000.000				Rp 5.757.389.750	Rp 48.948.000				92%	98%	4999999900%	4894799900%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp 114.425.300	Rp 89.492.200	N/A	N/A	N/A	Rp 110.366.025	Rp 86.494.128				96%	97%	8949219900%	8649412700%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp 26.790.500	Rp 51.240.000	N/A	N/A	N/A	Rp 26.790.500	Rp 50.139.690				100%	98%	5123999900%	5013968900%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp 1.125.731.201	Rp 1.246.577.001	N/A	N/A	N/A	Rp 1.070.848.693	Rp 1.219.566.378				95%	98%	124657700000%	121956637700%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	Rp 114.819.050	Rp 86.433.100	N/A	N/A	N/A	Rp 98.699.590	Rp 77.260.220				86%	89%	8643309900%	7726021900%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	N/A	N/A	N/A	Rp 4.834.850.000	Rp 3.377.150.000	N/A	N/A	N/A	Rp 4.653.960.216	Rp 3.259.225.617				96%	97%	337714999900%	325922561600%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	Rp 4.834.850.000	Rp 3.377.150.000	N/A	N/A	N/A	Rp 4.653.960.216	Rp 3.259.225.617				96%	97%	337714999900%	325922561600%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	N/A	N/A	N/A	Rp 5.031.000.000	Rp 3.275.000.000	N/A	N/A	N/A	Rp 5.029.863.000	Rp 3.273.993.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	327499999900%	327399299900%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	Rp 4.966.000.000	Rp 3.225.000.000	N/A	N/A	N/A	Rp 4.964.982.500	Rp 3.224.505.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	322499999900%	322450499900%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	Rp 65.000.000	Rp 50.000.000	N/A	N/A	N/A	Rp 64.880.500	Rp 49.488.000	N/A	N/A	N/A	100%	99%	49999999900%	4948799900%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	N/A	N/A	N/A	Rp 106.000.000	Rp 250.000.000	N/A	N/A	N/A	Rp 101.945.300	Rp 237.755.200	N/A	N/A	N/A	96%	95%	24999999900%	23775519900%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	Rp 106.000.000	Rp 250.000.000	N/A	N/A	N/A	Rp 101.945.300	Rp 237.755.200	N/A	N/A	N/A	96%	95%	24999999900%	23775519900%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	N/A	N/A	N/A	Rp 45.000.000	Rp 25.000.000	N/A	N/A	N/A	Rp 44.174.356	Rp 24.500.000	N/A	N/A	N/A	98%	98%	2499999900%	2449999900%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	Rp 45.000.000	Rp 25.000.000	N/A	N/A	N/A	Rp 44.174.356	Rp 24.500.000	N/A	N/A	N/A	98%	98%	2499999900%	2449999900%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dikatakan baik karena anggaran di tahun tersebut sudah terserap sesuai dengan pagu anggaran terutama pada program Aplikasi Informatika dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan kompeten di bidangnya.



2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 - a. 42 OPD
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD:
 - a. -
3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:
 - a. PT. PLN



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang komunikasi dan informatika. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Permasalahan yang menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
	Indeks SPBE	Belum Tercapai (<)	arsitektur SPBE belum tersusun secara optimal	Dilakukannya proses assesment secara berkala oleh MENPAN RB
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sesuai (=)	Penggunaan Vmeet terakhir pada tahun 2021, pada tahun setelahnya sudah beralih pada aplikasi Zoom Premium	sudah beralih pada aplikasi Zoom Premium



No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Belum Tercapai (<)	belum tercantum dalam dokumen proses bisnis yang diimplementasikan secara elektronik karena dokumen pembaharuan proses bisnis masih belum selesai	Tercantumnya dokumen-dokumen proses bisnis yang telah terimplementasi secara elektronik
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Belum Tercapai (<)	belum mengajukan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Melakukan workshop antar OPD dengan tujuan bisa saling terintegrasi
	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Belum Tercapai (<)	belum melakukan pengelolaan ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi karena tidak ada anggaran untuk menyertakan ASN dalam pelatihan kompetensi yang mendapatkan sertifikasi IT	melihat pada tahun 2020 sudah terlaksana dalam persentase 50% dengan memiliki anggaran, pada tahun 2022 tidak ada anggaran.
	Tersedianya buku profil daerah	Belum Tercapai (<)	bukan merupakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika melainkan tugas dan fungsi BAPPEDA	berkoordinasi dengan BAPPEDA
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Belum Tercapai (<)	kegiatan audit keamanan informasi dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada asset informasi fisik, belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022 karena SE atau Asset Informasi yang di audit belum ada	melakukan workshop keamanan data bagi setiap perangkat daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kurangnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Belum memadainya fasilitas untuk pengembangan Sistem Informasi berbasis IT
		Kurangnya Jaringan Infrastruktur TIK	Belum Memadainya Infrastruktur TIK dalam rangka pengembangan TIK
2	Pelaksanaan kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi melalui proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien	Kurangnya Pengelolaan Data Persandian dan Keamanan Informasi	Minimnya Pengelolaan Data Persandian
			Belum tersedianya fasilitas Keamanan Informasi
3	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan	Kurangnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi publik	Belum maksimalnya pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan
			Minimnya Fasilitasi dan asistensi pengelolaan informasi pelaksanaan Pemerintah Daerah
4	Belum Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data	Data statistik belum digunakan maksimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan	Belum maksimalnya pengelolaan Data Statistik
			Minimnya Monitoring dan Evaluasi Data Statistik

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 5 sasaran ke 13 dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan kematangan domain SPBE serta meningkatkan integrasi data statistik dalam menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan

No.	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Sudah memiliki Keputusan Bupati tentang tim koordinasi SPBE dan tim asesor internal SPBE	Arsitektur SPBE yang belum tersusun secara optimal
		Berhasil dalam pengajuan 3 layanan publik unggulan dan layanan terintegrasi diterima oleh kemenpanrb	Belum sepenuhnya terlaksana audit TIK

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar Yang Cepat Dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi - Belum meratanya penggelaran kabel FO atau radio broadband di wilayah utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya dana untuk peningkatan pita lebar (broadband) di kabupaten pamekasan - Kurang pahamnya stakeholder akan pentingnya kebutuhan anggaran maintenance jaringan FO dan perangkat-perangkatnya - Terbatasnya SDM IT yang dimiliki Diskominfo 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen yang kuat dari Diskominfo untuk terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-Government - Amanat dari perbup no. 18 tahun 2018 tentang pengelolaan e-government - Amanat dari perbup no. 57 tahun 2019 tentang pengembangan penatalaksanaan SPBE - Diskominfo sudah memiliki gelaran FO sepanjang 75km
2.	Meningkatnya Cakupan Wilayah Yang Terlayani Penyiaran Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isu dan strategi komunikasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terwujudnya penguatan kelembagaan dan kemandirian lembaga komunikasi publik khususnya Kelompok Informasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Radio RALITA FM yang merupakan LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) yang memiliki izin lengkap satu-satunya milik penda di madura sehingga



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kompetensi dan kapasitas SDM penyiaran yg memiliki sertifikasi kemampuan khusus di bidang penyiaran dan manajemen isu dan komunikasi di saat krisis 	<p>bisa difungsikan untuk penggunaan frekwensi dengan jangkauan yang lebih luas dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persaingan radio lokal di pamekasan tidak besar karena jumlah radio aktif tdk banyak
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Tidak memberikan layanan publik di bidang pos	-	-
4.	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya jaringan broadband yang memadai - Kurangnya transfer knowledge dari kementerian kominfo akan peranan pentingnya next generation broadband nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya dana untuk peningkatan pita lebar (broadband) di kabupaten pamekasan - Kurang adanya upgrade knowledge tentang network development dari kementerian kominfo - Terbatasnya SDM IT yang dimiliki diskominfo 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen yang kuat dari Diskominfo untuk terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-Government
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemancar seringkali rusak akibat cuaca - Biaya pemeliharaan sarana prasarana sangat rendah - Sarana dan prasarana yang ada ketinggalan dimana seharusnya dunia penyiaran butuh kecepatan dan keandalan peralatan - Tenaga teknisi yang memiliki keahlian khusus di peralatan keradioan di lokal pamekasan atau madura sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Radio mulai tergeser dengan saluran media sosial berbasis internet - Segmentasi radio saat ini kebanyakan berumur di atas 35 tahun sehingga regenerasi sulit tercapai - Radio tidak menjadi pilihan utama hiburan dan informasi masyarakat - Daya jangkau yang terbatas dan biaya pemeliharaan yang tinggi menjadi tantangan untuk berkembang dimasa depan - Videotron hanya memiliki daya jangkau sempit dan daya sampai yg rendah - Pemeliharaan dan biaya listrik videotron juga tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama besar radio dan posisi strategis videotron masih bisa menjadi daya tawar untuk mendapatkan iklan
6.	Meningkatnya pemanfaatan tik di sektor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat daerah masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan aplikasi jual beli berbasis TIK terutama yg berusia 50 tahun keatas - Mindset kepercayaan dan mekanisme aplikasi digital dalam bertransaksi untuk meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pelatihan atau akses pembelajaran literasi digital di bidang ekonomi terutama UMKM sehingga perkembangannya dalam bertransaksi menggunakan aplikasi jual beli digital masih rendah - Refocusing membuat kegiatan pemerintah didalam.mendorong KIM dan umkm terlibat dan aktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Dunia digital dan TIK sangat marak di saat pandemi ini sehingga secara organik masuk ke dalam aktifitas ruang hidup masyarakat - KIM saat ini sedang menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>perekonomian masih belum kuat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semangat KIM dalam meningkatkan kapasitasnya masih rendah dikarenakan keterlibatannya di dalam pemerintahan tingkat desa/ kelurahan masih minim sehingga beberapa KIM tidak kreatif dalam menggunakan TIK 	<p>menggunakan TIK menjadi sangat terhambat</p>	<p>informasi di tingkat lokal yang terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIM Saat ini dilibatkan dalam pemberitaan DBHCHT sebagai pemantik kegiatan KIM semakin aktif dan kreatif
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	<p>Belum maksimalnya fasilitas digital diruang publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi kepada publik / masyarakat tentang manfaat digitalisasi informasi dan layanan - Kurangnya sarana dan prasarana internet diruang publik - Kurang optimalnya platform yang dipergunakan oleh pemerintahan yang sesuai dengan platform yang trending dipergunakan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo memiliki wadah komunikasi melalui website dan media social lainnya - Diskominfo memiliki cyber corner untuk dapat mengedukasi masyarakat tentang digital teknologi - Diskominfo menyediakan titik hotspot di public area
8.	Dukungan implementasi digitalisasi	<p>Belum optimalnya implementasi digitalisasi untuk semua OPD di kabupaten Pamekasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi di lapangan tentang support staff Diskominfo untuk implementasi digital tidak disupport dengan anggaran yang cukup - Rendahnya pemahaman OPD akan pentingnya implementasi e-Government 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen yang kuat dari Diskominfo untuk terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-Government
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersentralisasinya / terpusatnya proses data terkait dengan Government Publik Relation (GPR) atau Kehumasan di Dinas Kominfo Kab Pamekasan yang menyebabkan perbedaan dalam tata kelola informasi dan Komunikasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya antusiasme atau animo masyarakat terhadap program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah terkait dengan pola penyebaran atau diseminasi informasi dan komunikasi publik dalam membangun masyarakat yang cerdas melek IT dan Media 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya team solid yang terbentuk di Dinas Kominfo pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Tusi menangani sebaran informasi dan komunikasi untuk disebarluaskan ke beberapa kanal/Frekuensi Media Sosial resmi Pemerintah yang dikelola oleh Dinas Kominfo serta melalui siaran Radio Ralita FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan tayangan Edukatif yang bernilai sosialisasi dan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Pola diseminasi informasi dan komunikasi publik yang masih bersifat Parsial diantara OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak merata dan tidak seragam - Lemahnya koordinasi dan supervisi diantara OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyamakan Output ataupun Outcome dari kualitas informasi dan komunikasi publik untuk membangun masyarakat yang melek IT atau Media 	<ul style="list-style-type: none"> - Mudahnya terhasut/ terprovokasi oleh informasi atau komunikasi yang bersifat mengadu domba atau yang berbau berita menyesatkan/Bohong (HOAX) - Gampangnya mengakses situs atau laman kurang kredibel dalam mengkonsumsi informasi dan komunikasi sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang cenderung sesat akibat terlalu banyaknya informasi yang diserap yang keliiru (Carnucopia) 	<ul style="list-style-type: none"> Advokasi melalui Videotron <ul style="list-style-type: none"> - Adanya jaringan khusus untuk menjangkau ke seluruh kecamatan melalui Fiber Optik Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dikelola oleh Dinas Kominfo yakni VIMATE. Seiring dengan bertambahnya Kuantitas pertemuan secara Daring dikarenakan adanya Pandemi COVID-19
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik - Kurang optimalnya sinkronisasi komunikasi data secara digital antar OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi sectoral yang sangat banyak dan tidak terintegrasi - Sentralisasi database OPD sulit dilakukan - Berubah-ubahnya kebijakan yang menyebabkan aplikasi sulit dipergunakan secara konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen yang kuat dari Diskominfo untuk terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-Government - Perangkat server Diskominfo yang cukup memadai - Amanat dari perbup no. 18 tahun 2018 tentang pengelolaan e-government <ul style="list-style-type: none"> - Amanat dari perbup no. 57 tahun 2019 tentang pengembangan penatalaksanaan SPBE



3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Kurangnya pemanfaatan infrastruktur TIK dalam pengelolaan media komunikasi dan informasi publik di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik	Distribusi sarana pembelajaran dan infrastuktur TIK bagi masyarakat yang belum memadai
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Belum optimalnya ketersediaan data statistik	Portal Satu Data Indonesia	Sosialisasi bagi masyarakat serta monitoring dan evaluasi yang belum maksimal dalam pengelolaan Data Statistik
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Kurangnya pengelolaan data persandian dan keamanan informasi		Fasilitas dan SDM data persandian yang minim

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	N/A	N/A	N/A
2.	N/A	N/A	N/A
3.	N/A	N/A	N/A

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	penyelesaian informasi publik di Dinas kominfo melalui PPID Kabupaten (utama), berjalan tertib dan sesuai jadwal sidang yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Timur	Kurangnya kesadaran dan belum mengerti pentingnya keterbukaan informasi publik dari petugas PPID OPD/Kecamatan, dikarenakan selalu ada perubahan petugas PPID OPD/Kecamatan
2.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	PPID Kabupaten Pamekasan dengan posisi sebagai PPID Utama, memiliki 2 tenaga ahli (Tenaga Ahli PPID dan Koordinator Desk PPID)	Tenaga PPID masih sebagai tenaga kontrak yang dibayar oleh APBD, belum berstatus sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
3.	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Adanya portal satu data kabupaten pamekasan	Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang Portal Satu Data

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, Dinas komunikasi dan informatika harus menghadapi beberapa faktor penghambat diantaranya SDM yang kurang mumpuni dan kurang dikenalnya portal satu data oleh masyarakat, akan tetapi dengan adanya portal satu data tersebut diharapkan bisa menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

3.5 Isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.



Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional		
2	Nasional	Satu data indonesia	Penerapan Open government data Penerapan Interoperabilitas data
3	Daerah	Satu data indonesia	Penerapan Open government data Penerapan Interoperabilitas data
Pengelolaan isu publik perihal program prioritas daerah		Stabilitas pemberitaan (meminimalisir konflik media/isu negatif perihal program prioritas daerah)	
Pusat Data Nasional		Penempatan semua data di Pusat Data Nasional	
Keamanan informasi		Penerapan Sertifikat Elektronik Penerapan SMKI	

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100



Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada kriteria yang telah di tentukan dalam tabel pembobotan.

Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Skala Skor						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Pusat Data Nasional	20	10	20	10	10	15	85
2	Satu data indonesia	20	10	20	10	10	15	85
3	Keamanan informasi	20	10	15	10	10	15	80
4	Pengelolaan isu publik perihal program prioritas daerah	15	10	10	10	10	20	75

Setelah dilakukan penilaian dan pembobotan isu strategis, selanjutnya menentukan skor rata-rata setiap isu strategis. Isu yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi memiliki dampak paling besar untuk segera di selesaikan.

Tabel 3.11 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Pusat Data Nasional	85	14,17
2	Satu Data indonesia	85	14,17
3	Keamanan Informasi	80	13,33
4	Pengelolaan Isu Publik perihal program prioritas daerah	75	12,50

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Pusat Data Nasional
2. Satu Data indonesia
3. Keamanan Informasi
4. Pengelolaan Isu Publik perihal program prioritas daerah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan RPD Kabupaten Pamekasan yaitu Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas didukung dengan 2 (dua) sasaran RPD yaitu 1) Meningkatkan kematangan domain SPBE; 2) Meningkatkan integrasi data statistik.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			Kondisi Akhir 2026
					2024	2025	2026	
	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks pelayanan publik (IPP)		4,0	4,5	4,85	4,85
		Meningkatnya kematangan domain SPBE	Indeks SPBE	2,10	2,5	2,5	2,5	2,5
		Meningkatnya integrasi data statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral		2,0	2,0	2,1	2,1

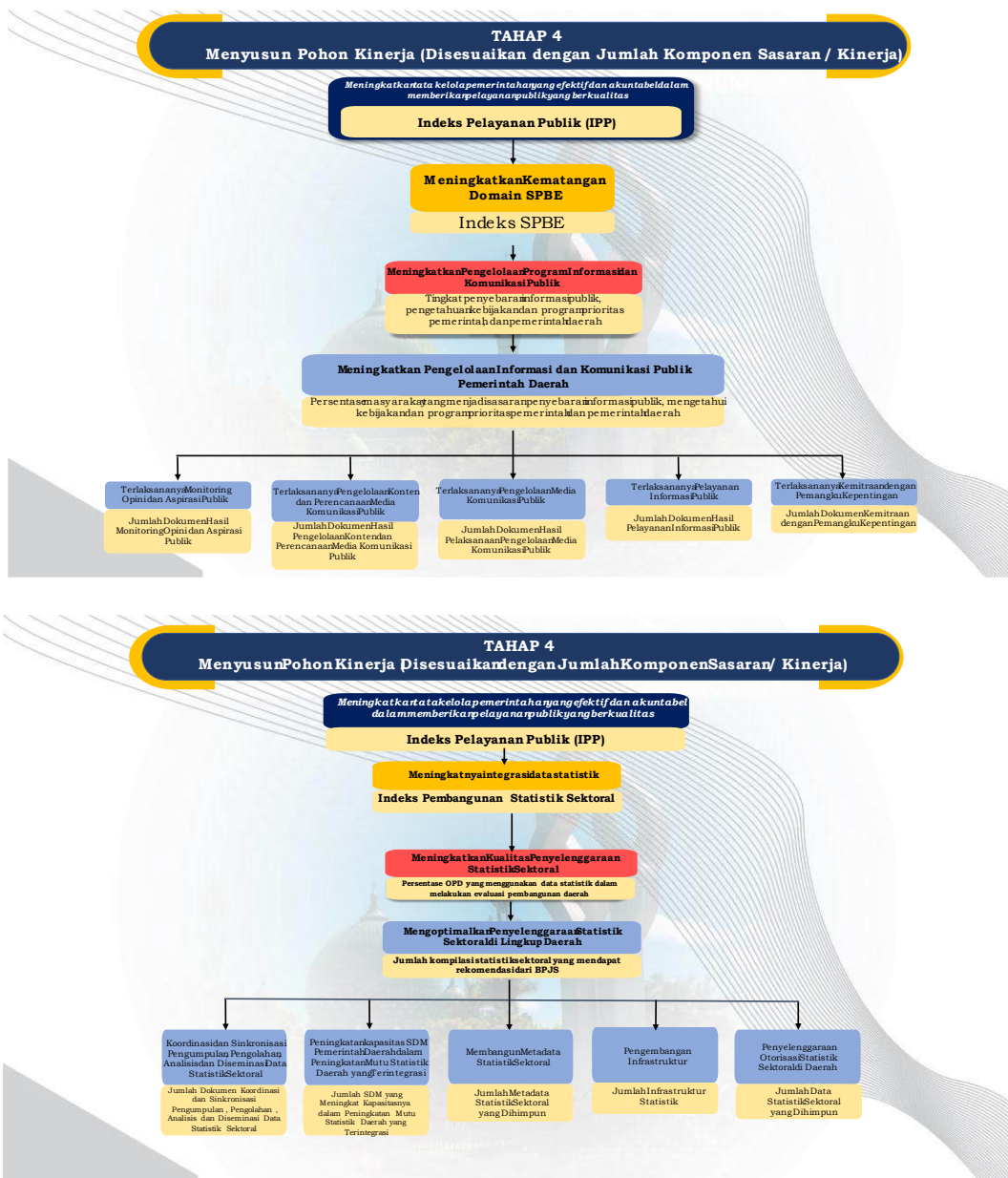


Tabel 4.2 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

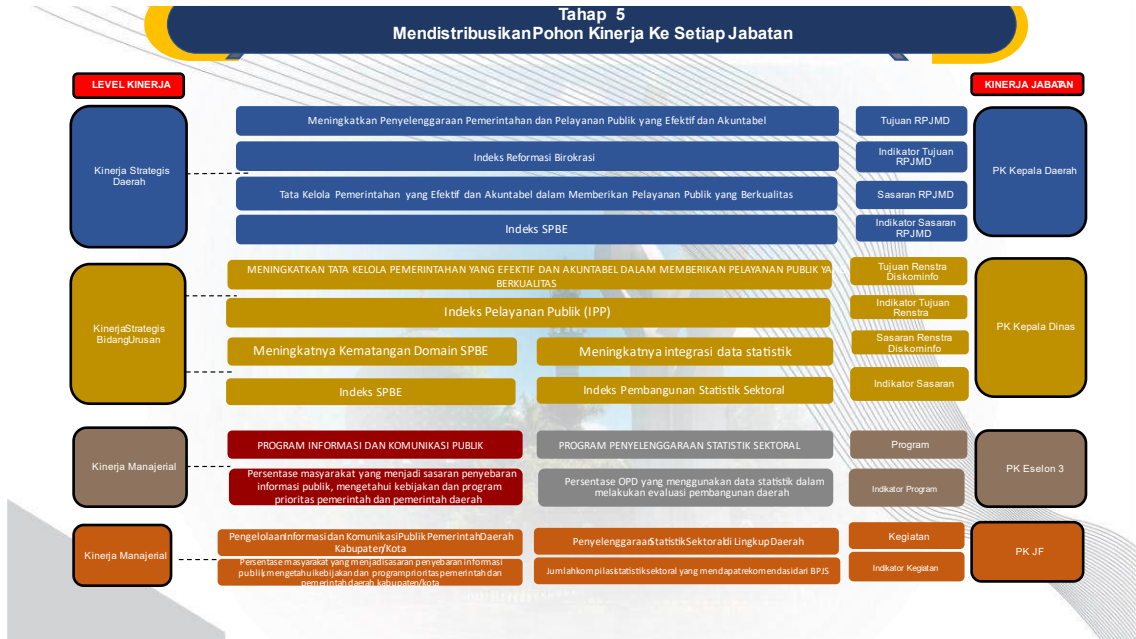
No	NSPK	Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2024	2025	2026

NIHIL

4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah



Gambar 4.1 Pohon Kinerja



Gambar 4.2 Cascading Kinerja



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

TUJUAN: Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel			
SASARAN: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kematangan domain SPBE	1. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE	1. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE
	2. Meningkatnya integrasi data statistik	2. Penyediaan dan Pemanfaatan data statistik untuk kebijakan daerah melalui Portal Satu Data Kabupaten	2. Melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Indeks pelayanan publik (IPP)		4,0	4.705.000.000	4,5	5.280.590.000	4,85	5.584.951.700	4,85	5.584.951.700	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
			Meningkatnya kematangan domain SPBE	Indeks SPBE	2,10	2,5	5.047.620.400	2,5	5.672.799.012	2,5	5.993.932.482	2,5	5.993.932.482	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
							9.677.581.600		9.967.909.048		10.266.946.319				
		2101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP OPD	82,50	82,00	4.629.961.200	82,00	4.295.110.036	82,00	4.273.013.837	82,00	4.273.013.837	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6	6 Dokumen	110.000.000	6 Dokumen	131.300.000	6 Dokumen	125.349.500	6 Dokumen	125.349.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2101	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	66.000.000	3 Dokumen	85.300.000	3 Dokumen	78.349.500	3 Dokumen	78.349.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Perangkat Daerah												
		2	1601	201	202	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1601	201	203	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1601	201	204	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2	16	01	20	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	16	01	20	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	16	01	20	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2	16	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD	1 OPD	2.389.225.199	1 OPD	2.460.901.955	1 OPD	2.534.729.013	1 OPD	2.534.729.013	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	16	01	20201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	2.389.225.199	22 Orang/Bulan	2.460.901.955	22 Orang/Bulan	2.534.729.013	22 Orang/Bulan	2.534.729.013	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	16	01	2005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 ASN	10 Orang	40.000.000	10 Orang	65.000.000	10 Orang	37.131.500	10 Orang	37.131.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	16	01	200502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0	-	27 Paket	20.000.000	0	-	0	-	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	16	01	200509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	10 ASN	10 Orang	40.000.000	10 Orang	45.000.000	10 Orang	37.131.500	10 Orang	37.131.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							dan Pelatihan												
		2	16	01	20	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 Kantor	1 Kantor	66.500.000	1 Kantor	67.575.000	1 Kantor	65.150.000	1 Kantor	65.150.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	01	20	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3.000.000	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	01	20	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Jenis ATK	25 Paket	5.000.000	25 Paket	5.000.000	25 Paket	5.000.000	25 Paket	5.000.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	01	20	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Kotak	3 Paket	6.000.000	3 Paket	6.000.000	3 Paket	6.300.000	3 Paket	6.300.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	01	20	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	16000 Lembar	4 Paket	4.000.000	4 Paket	4.000.000	4 Paket	4.200.000	4 Paket	4.200.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							n yang Disediakan												
		2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Rapat Koordinasi	48 Laporan	45.000.000	48 Laporan	45.000.000	48 Laporan	42.000.000	48 Laporan	42.000.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	
		2	1	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	3.500.000	4 Dokumen	2.575.000	4 Dokumen	2.650.000	4 Dokumen	2.650.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	5 Unit	2 Unit	503.627.500	2 Unit	118.886.325	2 Unit	19.152.665	2 Unit	19.152.665	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit mobil	450.000.000	5 unit sepeda motor	110.000.000	0	-	0	-	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2	160	2065		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		3 unit	15.000.000	2 unit	5.000.000	0	-	0	-	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1601	2067		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	11 Unit	4 Unit	38.627.500	2 unit	3.886.325	4 unit	19.152.665	4 unit	19.152.665	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1601	2088		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	10 Jasa Layanan	5 Jasa	1.316.608.501	5 Jasa	1.356.106.756	5 Jasa	1.394.577.959	5 Jasa	1.394.577.959	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1601	2082		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Jasa Layanan	12 Laporan	120.008.501	12 Laporan	123.608.756	12 Laporan	125.105.019	12 Laporan	125.105.019	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1601	2084		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.196.600.000	12 Laporan	1.232.498.000	12 Laporan	1.269.472.940	12 Laporan	1.269.472.940	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1601	2099		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah pemeliharaan barang	1 Gedung	11 Unit	204.000.000	11 Unit	95.340.000	11 Unit	96.923.200	11 Unit	96.923.200	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah											
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3 Unit	40.000.000	3 Unit	56.200.000	3 Unit	57.436.000	3 Unit	57.436.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	5.000.000	3 Unit	5.150.000	3 Unit	5.304.500	3 Unit	5.304.500	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	4 Unit	4.000.000	4 Unit	3.090.000	4 Unit	3.182.700	4 Unit	3.182.700	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2	16	01	209	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2 unit	125.000.000	-	-	-	-	-	-	Kec. Pamekasan	
		2	16	01	209	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.900.000	2 Unit	31.000.000	2 Unit	31.000.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	63,4098%	100%	1.980.000.000	100%	2.235.000.000	100%	2.371.602.200	100%	2.371.602.200	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan kabupaten/ kota	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
		2	1	0	2	0	1													
							Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	71,014 5%	70%	1.980.00 0.000	75%	2.235.00 0.000	80%	2.371.60 2.200	80%	2.371.60 2.200	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	1	0	2	0	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.00 0	1 Dokumen	25.304.5 00	1 Dokumen	25.304.5 00	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD								
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
		2	16	02	20	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		2	Dokumen	5.000.000	2	Dokumen	25.000.000	2	Dokumen	25.304.500	2	Dokumen	25.304.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	16	02	20	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3	Dokumen	3	Dokumen	110.000.000	3	Dokumen	120.000.000	3	Dokumen	150.000.000	3	Dokumen	150.000.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	02	20	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	1	Dokumen	60.000.000	1	Dokumen	65.000.000	1	Dokumen	66.836.700	1	Dokumen	66.836.700	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	02	20	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5	Dokumen	5	Dokumen	1.800.000.000	5	Dokumen	2.000.000.000	5	Dokumen	2.104.156.500	5	Dokumen	2.104.156.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	60%	2.725.000.000	60%	3.045.590.000	60%	3.213.349.500	0,6	3.213.349.500		3.213.349.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan			



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Domaian Kebijakan Internal SPBE	1,80	3		3		3		3		Dinas Kominfo		
							Domain Tata Kelola SPBE	1,60	3		3		3		3		Dinas Kominfo		
							Domain Manajemen SPBE	1,00	3		3		3		3		Dinas Kominfo		
							Domain Layanan SPBE	2,87	3		3		3		3				
		2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	2.520.000.000	100%	2.825.590.000	100%	3.015.913.500	100%	3.015.913.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	16	03	201	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.590.000	1 dokumen	15.913.500	1 dokumen	15.913.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							n Daerah Kabupaten/Kota												
		2	163	203		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 jaringan	1 jaringan	2.500.000.000	1 jaringan	2.800.000.000	1 jaringan	3.000.000.000	1 jaringan	3.000.000.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	
		2	163	202		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	42 OPD	205.000.000	42 OPD	220.000.000	42 OPD	197.436.000	42 OPD	197.436.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	
		2	163	202	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	155.000.000	3 Dokumen	155.000.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Kabupaten/ Kota												
		2	163	202	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city		1 Dokumen	25.000.000	0	-	0	-	0	-	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	163	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 Aplikasi	12 Aplikasi	20.000.000	12 Aplikasi	25.000.000	12 Aplikasi	15.913.500	12 Aplikasi	15.913.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2	1	0	2	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	15.913.500	3 Dokumen	15.913.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	1	0	2	1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	10.609.000	1 Dokumen	10.609.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan
		2	2	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks keamanan informasi		I	88.000.000	II	105.600.000	III	113.549.500	III	113.549.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2 2 0 2 2 0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	1,8182 %	3%	68.000.000	6%	80.300.000	10%	82.949.500	10%	82.949.500	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2 2 0 2 2 0 1	Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.218.000	3 Dokumen	25.218.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD								
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
							Kota yang Ditetapkan																	
		2	2	0	2	2	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik		1	Laporan	13.000.000	1	Laporan	15.300.000	1	Laporan	15.600.000	1	Laporan	15.600.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	2	0	2	2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1	Perangkat Daerah	42	Perangkat Daerah	35.000.000	42	Perangkat Daerah	40.000.000	42	Perangkat Daerah	42.131.500	42	Perangkat Daerah	42.131.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode						Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		2	2	0	2	2	0	2	2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat daerah Kabupaten/ Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	1,9231 %	10%	20.000.000	15%	25.300.000	20%	30.600.000	20%	30.600.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	2	0	2	2	0	2	0	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi		4 Perangkat Daerah	20.000.000	6 Perangkat Daerah	25.300.000	8 Perangkat Daerah	30.600.000	8 Perangkat Daerah	30.600.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		Meningkatnya integrasi data statistik						Indeks Pembangunan an Statistik Sektoral						2,0	254.620.400	2,0	286.609.012	2,1	295.431.282	2,1	295.431.282	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan
		2	2	0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan	100%			100%	100%	254.620.400	100%	286.609.012	100%	295.431.282	100%	295.431.282	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							evaluasi pembangunan daerah												
		2	202	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	4 Kompilasi Produk Administrasi	20 Kompilasi Produk Administrasi	254.620.400	40 Kompilasi Produk Administrasi	286.609.012	60 Kompilasi Produk Administrasi	295.431.282	60 Kompilasi Produk Administrasi	295.431.282	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	
		2	202	2,01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	42 OPD	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	57.436.000	4 Dokumen	57.436.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	
		2	202	2,01		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik	42 ASN	42 Orang	30.000.000	42 Orang	35.000.000	42 Orang	36.827.000	42 Orang	36.827.000	Dinas Kominf o	Kec. Pamekasan	



Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Daerah yang Terintegrasi												
		2	202	2,013		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Metadata	20 Metadata	25.000.000	40 Metadata	25.050.000	60 Metadata	26.522.500	60 Metadata	26.522.500	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	202	2,015		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	24.620.400	1 Infrastruktur	25.059.012	1 Infrastruktur	25.510.782	1 Infrastruktur	25.510.782	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	
		2	202	2,016		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Buku profil	850 Data	125.000.000	850 Data	146.500.000	850 Data	149.135.000	850 Data	149.135.000	Dinas Kominfo	Kec. Pamekasan	



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
	Indeks pelayanan publik (IPP)	3,61	4,0	4,5	4,85	4,85
	Indeks SPBE	2,10	2,5	2,5	2,5	2,50
	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	N/A	2,0	2,0	2,1	2,1

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	60%	60%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75%	90%	100%



No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	2	2
7	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	100%	100%
9	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	TIDAK	TIDAK	TIDAK
10	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100%	100%	100%
11	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	100%	100%
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%	100%	100%
13	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	25%	50%	75%



No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
14	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	15%	20%	25%
15	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
16	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	10%	25%	50%
17	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	100%	100%
18	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	100%	100%
19	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	50%	75%	100%
20	Persentase data yang dapat berbagi pakai			
21	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	80%	80%	80%
22	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	10%	20%	30%
23	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ADA	ADA	ADA
24	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	75%	90%	100%
25	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80%	90%	100%
26	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	85%	90%	100%



No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
27	Tersedianya buku profil daerah	Tersedia	Tersedia	Tersedia
28	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	39	39	39
29	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	500	500	500
30	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	23	25	30
31	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	25	40	60
32	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	5%	10%	15%
33	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	5%	10%	15%
34	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	8%	8%	8%
35	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	15%	20%	25%
36	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	5%	10%	15%
37	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	5%	13%	20%



Tabel 7.3 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana
		2024	2025	2026				2024	2025	2026	

NIHIL



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.



Pamekasan, April 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pamekasan



SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730802 199302 1 001



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan